ANALISIS KENDALA DAN UPAYA PENERAPAN SIPD DAN CORE TAX PADA KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Andini Nathaniela Nabilah Putri[1], Moh. Danang Bahtiar[2]

[1,2]*Universitas Negeri Surabaya*
E-mail : [1]andininathaniela.23106@mhs.unesa.ac.id, [2]mohbahtiar@unesa.ac.id

ABSTRAK

Digitalisasi keuangan daerah melalui Sistem informasi pemerintah daerah dan Core Tax menjadi Langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas Administrasi publik. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala serta Upaya dalam penerapan SIPD dan CTAS di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap staf bagian keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD menghadapi beberapa kendala berupa kurangnya pelatihan dan sosialisasi, Gangguan teknis, ketidaksinkronan data, serta keterbatsan infrastruktur teknologi. Sementara itu, Core Tax mengalami beberapa kendala berupa kerumitan teknis dan integrasi, Gangguan Server, Keterbatasan infrastruktur, kurangnya pendampingan teknis, serta pembaruan sistem tanpa petunjuk yang jelas. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan, dan rendahnya efisiensi kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan kedua sistem sangat bergantung pada peningkatan Kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta pendampingan teknis dari pemerintah pusat. Temuan ini memberikan implikasi praktis terkait perlunya pelatihan berkelanjutan dan perbaikan sistem untuk mendukung optimalisasi digitalisasi keuangan daerah.

Keywords : *SIPD; Core Tax; Kendala Penerapan; Upaya; Keuangan Daerah*

ABSTRACT

Digitalization of regional finances through the Regional Government Information System and Core Tax is a crucial step in increasing the transparency and effectiveness of public administration. However, its implementation still faces several obstacles. This study aims to analyze the obstacles and efforts in implementing SIPD and CTAS at the Lamongan Regency DPRD Secretariat. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation of finance staff. The results indicate that SIPD faces several obstacles, including a lack of training and outreach, technical disruptions, data asynchronous, and limited technological infrastructure. Meanwhile, Core Tax faces several obstacles, including technical and integration complexity, server disruptions, infrastructure limitations, a lack of technical assistance, and system updates without clear instructions. These obstacles result in reporting delays and low work efficiency. This study concludes that the successful implementation of both systems is highly dependent on increasing human resource capacity, strengthening technological infrastructure, and technical assistance from the central government. These findings provide practical implications regarding the need for ongoing training and system improvements to support the optimization of regional financial digitalization.

Keywords : *SIPD; Core Tax; Implementation Obstacles; Efforts; Regional Finance*

PENDAHULUAN

Sistem informasi berkembang dengan cepat memasuki era revolusi industry 5.0 yang menggunakan teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia untuk melaksanakannya. Manusia telah membuat teknologi yang lebih canggih dan berkembang dari waktu ke waktu.(Sijabat et al., 2024) Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transpara, dan akuntabel. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerinatahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, perencanaan daerah dan pelayanan public. Teknologi juga mendukung manajemen dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan Keputusan, sehingga sistem informasi akuntansi menjadi bagian penting dalam sistem informasi manajemen. (Dampaknya & Efisiensi, 2025).

Salah satu system yang dikembangkan pemerintah adalah Sistem informasi daerah (SIPD), digitalisasi yang berfungsi sebagai wadah integrasi data perencanaan,penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. (Budi et al., n.d.). SIPD dihadirkan sebagai bentuk penyempurnaan dari system informasi mnajemen daerah (SIMDA) yang sebelumnya digunakan, dengan tujuan utama meningkatkan sinkronisasi antara proses perencanaan dan pengangguran diseluruh tingkat pemerintahan secara digitial dan akurat. Melalui SIPD, pemerintah daerah diharapkan mampun menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, RKA, dan Laporan Realisasi Anggaran secara lebih tertib, terstandarisasi dan sistematis. (Kamilah et al., 2025)

Namun demikian, penerapan SIPD di sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih mengalami beberapa hambatan atau kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain minimnya pelatihan dan sosialisasi bagi pegawai untuk pengoperasian SIPD, Gangguan teknis seperti server yang sering mengalami eror akibat penggunaan sistem secara bersamaan oleh seluruh instansi pemeintah, keterlambatan sinkronisasi data, misalnya transaksi yang telah diproses tetapi masih tercatat belum diproses. Serta keterbatasan fasilitas teknologi, termasuk perangkat IT yang belum stabil dan jaringan internet atau jaringan listrik yang tidak stabil. Kondisi ini dapat memperlambat proses penginputan data. (Sipd et al., 2024)

Di sisi lain, pemerintah pusat juga melakukan pembaruan besar dalam administrasi perpajakan melalui penerapan Core Tax Administration System (CTAS). System ini merupakan Langkah modernisasi untuk memperbaiki proses bisnis perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi. (Dimetheo et al., 2024).Core Tax mengotomatisasi berbagai rangkaian proses mulai dari registrasi, pengolahan dokumen perpajakan, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Reformasi ini merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kredibilitas system perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong peningkatan penerimaan negara. (Ananda et al., 2025).

Meskipun, dirancang untuk mempermudah proses perpajakan, Core Tax juga menghadapi kendala dalam penerapannya. Penerapan Core Tax masih menemui kendala. Secara teknis, sistem core tax tergolong kompleks dan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pegawai sering melakukan input data ganda. kurangnya sosialisasi dan pelatihan membuat staf harus memperlajari sistem secara mandiri. Core Tax juga terkadang mengalami pembaruan yang tidak disertai petunjuk teknis yang jelas, terlebih ketika ada perubahan kebijakan atau format laporan baru.(Purnomo et al., 2025). Gangguan server downtime pada periode pelaporan juga

memperlambat kinerja. Selain itu fasilitas teknologi yang masih terbatas, termasuk kualitas internet dan jaringan listrik. (Claresta et al., 2025)

SIPD dan Core Tax pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu memperkuat transparansi, akutabilitas, serta efisiensi tata Kelola keuangan pemerintah . Keduanya juga memiliki peran yang sangat relevan dengan fungsi secretariat DPRD Kabupaten Lamongan yang bertanggng jawab terhadap kelancaran pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, adanya berbagai kendala penerapan dilapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan kedua system belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih memerlukan evaluasi mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, melihat perntingnya peran kedua system tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan Upaya penerapan SIPD dan Core Tax sebagai hambatan dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini Adalah mengidentifikasi kendala yang muncul, menganalisis dampak kendala terhadap efektivitas pelaporan keuangan, serta memberikan Upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam mendukung keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kendala dan Upaya penerapan SIPD dan Core Tax di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan. Populasi penelitian ini Adalah seluruh staf bagian keuangan pengguna sistem tersebut. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu hanya staf yang terlibat langsung dalam proses penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dan obervasi langsung terhadap pengguna aplikasi selama periode penelitian. Instrument penelitian berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder berasal dari jurnal, peraturan, dan dokumen resmi instansi. Data analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Asumsi penelitian ini Adalah bahwa seluruh informan memahami tugasnya dan menggunakan SIPD dan Core Tax secara rutin. Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada satu instansi, namun tetap memberikan detail yang cukup untuk memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama magang di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten lamongan, saya menfokuskan pengamatan pada penerapan SIPD dan Core Tax. Proses belajar dan memahami antarmuka serta fungsi-fungsi sistem ini memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Saya juga mengalami kesulitan dalam memahami beberapa fitur teknis yang rumit, yang berdampak pada kecepatan dan akurasi dalam menyelesaikan tugas. Di pihak lain, terdapat masalah komunikasi dan koordinasi antar staf dalam penggunaan SIPD dan Core Tax. Beberapa staf memiliki pemahan yang berbeda mengenai prosedur dan penggunaan SIPD dan Core Tax, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pengelolaan data keuangan. Hal ini juga memperlambat proses kerja dan menambah risiko kesalahan. Saya juga mengamati bahwa keterbatasan akses ke perangkat dan dukungan teknologi menjadi kendala. Beberapa perangkat komputer yang digunakan untuk mengakses tidak selalu berfungsi dengan optimal, dan dukungan teknis yang tersedia di kantor sering kali tidak memadai untuk menyelesaikan masalah teknis yang muncul. Terdapat pula masalah dalam penerapan prosedur yang belum konsisten. Beberapa bagian di

kantor belum sepenuhnya mengikuti prosedur standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data dan kesulitan dalam proses verifikasi dan pelaporan keuangan. Penerapan SIPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan merupakan Upaya penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD diharapkan mampu menjadi sarana modernisasi tata kelola keuangan daerah supaya terintegrasi serta akurat. Tetapi, seperti halnya penerapan teknologi baru dalam sistem pemerintahan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses implementasi SIPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan bagian keuangan, diketahui bahwa Penerapan sistem informasi ini dianggap kompleks oleh pengguna karena,

1. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai

Meskipun ada pelatihan awal, tidak ada pelatihan berkelanjutan atau pembaruan yang rutin, sehingga staf tidak selalu memahami perubahan atau fitur terbaru dari SIPD. Masalah komunikasi dan koordinasi antar staf disebabkan oleh komunikasi internal yang lemah.

2. Gangguan teknis

Server yang sering mengalami eror juga menjadi kendala dalam proses penginputan data dan menyebabkan keterlambatan. Masalah ini terjadi karena SIPD diakses secara bersamaan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

3. Keterlambatan Sinkronisasi Data

Terkadang data pada SIPD tidak sinkron, seperti contohnya di staf akuntansi itu di mana transaksi yang seharusnya sudah diproses masih tercatat sebagai belum diproses. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan dan penyerapan anggaran, serta menganggu kelancaran proses administrasi keuangan.

4. Keterbatasan akses dan dukungan teknologi

Keterlambatan akses dan dukungan teknologi disebabkan oleh dukungan teknologi yang masih terbatas, seperti perangkat computer yang tidak sesuai dengan spesifikasi SIPD dan minimnya dukungan teknis. Selain itu, Koneksi internet yang lemah juga menjadi kendala, karena sering menimbulkan gangguan atau koneksi internet yang tidak stabil sehingga menghambat pengoperasian SIPD, Pengguna harus login ulang, dan menunda penyelesaian penginputan data tepat waktu.

Hambatan ini berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran yang telah disetujui. Untuk itu, pemerintah kabupaten terus melakukan koordinasi dengan kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat perbaikan sistem.

Penerapan Core Tax juga sebenarnya sudah membantu peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak daerah, tetapi masih menghadapi kendala dari sisi teknologi,SDM, dan koordinasi kebijakan. Core Tax System menghadapi kendala teknis akibat kompleksitas sistem dan proses penyatuan dengan sistem lama milik DJP. Gangguan seperti error, bug pada e-billing dan SPT, serta kesalahan validasi data sering terjadi karena infrastruktur teknologi belum matang. Bahkan, DJP sempat menjalankan dua sistem secara bersamaan sebagai solusi sementara akibat tingginya gangguan sistem yang menghambat proses pelaporan dan pelayanan pajak.Kendala dalam penggunaan Core Tax juga sebagian besar disebabkan oleh tanpa pendampingan yang cukup dari instansi pusat (BPKAD atau DJP). Coretax memiliki sistem yang cukup kompleks, dengan menu dan fitur yang membutuhkan pemahaman teknis tinggi. Core Tax belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lama DJP, sehingga staf harus melakukan input ganda / mengoperasikan dua sistem sekaligus yang memakan waktu dan berpotensi menyebabkan kesalahan data. Coretax

sering mengalami pembaruan (update) dari pemerintah pusat. Pembaruan ini kadang tidak disertai petunjuk teknis yang jelas, sehingga pegawai daerah kebingungan menyesuaikan format baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan bagian keuangan khususnya staf perpajakan, diketahui bahwa Pengoperasian sistem ini dianggap rumit oleh pengguna karena,

1. Kerumitan Teknis dan Integrasi Sistem

Coretax memiliki sistem yang cukup kompleks, dengan menu dan fitur yang membutuhkan pemahaman teknis tinggi. Beberapa transaksi juga belum bisa terhubung otomatis, sehingga pegawai harus melakukan input ganda, yang memakan waktu dan berpotensi menyebabkan kesalahan data.

2. Gangguan teknis

Gangguan Server yang kerap terjadi menjadi hambatan saat masa pelaporan pajak. Kendala ini muncul karena Core Tax diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna dari berbagai instansi pemerintah di seluruh indonesia.

3. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Kendala lain terletak pada sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat penyimpanan data yang belum optimal. Sering mengalami gangguan jaringan internet, dan tegangan listrik terutama ketika mengakses sistem secara bersamaan.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan Teknis

Penerapan sistem baru sering kali dilakukan tanpa pendampingan yang cukup dari instansi pusat (BPKAD atau DJP). Staf Sekretariat DPRD harus belajar secara mandiri tanpa bimbingan yang jelas. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kebingungan dalam penggunaan sistem baru.

5. Kendala Kebijakan dan Pembaruan Sistem

Coretax sering mengalami pembaruan (update) dari pemerintah pusat. Pembaruan ini kadang tidak disertai petunjuk teknis yang jelas, sehingga pegawai daerah kebingungan menyesuaikan format baru. Selain itu, perubahan kebijakan pelaporan atau tenggat waktu juga menimbulkan kebingunan.

Dampak positif dan Negative Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Memberikan beberapa dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, SIPD meningkatkan transparansi karena seluruh proses pencatatan, penganggaran, dan pelaporan dilakukan secara digital dan tercatat otomatis dalam sistem. Dengan adanya pencatatan otomatis, peluang manipulasi data menjadi lebih kecil dan proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat. Temuan/hasil ini sejalan dengan (Septiani & Isnawaty, 2025) yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem informasi daerah meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan alur pengelolaan keuangan. Selain itu, SIPD membantu mempercepat proses administrasi karena data dapat diakses dan dilaporkan tanpa harus melalui proses manual yang cukup menyita waktu.

Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini menemukan bahwa SIPD juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan. penelitian (Ruang & Pertanahan, 2024)Server SIPD menegaskan bahwa sering eror menyebabkan gangguan dalam proses input data dan membuat pekerjaan tertunda. Ketidaksinkronan data, dimana transaksi yang seharusnya sudah diproses tetapi masih belum diproses. Kurangnya pelatihan berkelanjutan juga membuat staf kesulitan mengikuti pembaruan sehingga kesalahan input. Selain itu, juga Menegaskan bahwa kualitas jaringan internet dan spesifikasi perangkat sangat mempengaruhi kestabilan aplikasi berbasis web.

Kondisi ini sesuai dengan temuan lapangan, dimana koneksi internet dan jaringan Listrik yang tidak memadai dan perangkat computer yang belum optimal menyebabkan logout otomatis dan pekerjaan harus diulang.

Dampak positif dan Negatif Core Tax Administration System (CTAS)

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) memberikan dampak positif terutama pada hal akurasi efisiensi pengolahan data perpajakan. CTAS digunakan untuk melakukan pencatatan pajak daerah. Penelitian ini(Arum & Fitrianingsih, 2025) dengan adanya CTAS meliputi integrasi data nasional yang kuat, proses verifikasi dan audit yang lebih akurat, serta pencatatan transkasi yang lebih detail dan minim manipulasi. Sistem ini sangat membantu instansi pemerintah dalam memastikan keakuratan pelaporan pajak, sementara DJP online hanya berfungsi sebagai platform layanan public untuk wajib pajak.

Namun demikian, Core Tax juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kerumintan menu dan integrasi sistem yang belum sempurna membuat staf harus melakukan input ganda. Hal ini menyebabkan proses kerja menjadi lambat. Coretax juga sering mengalami pembaruan (update) dari pemerintah pusat. Pembaruan ini kadang tidak disertai petunjuk teknis yang jelas, sehingga pegawai daerah kebingungan menyesuaikan format baru. Temuan ini juga didukung oleh (Mara & Munandar, 20) Gangguan jaringan internet dan jaringan internet yang tidak memadai dan perangkat yang belum optimal menyebabkan logout otomatis dan keterlambatan akses dan bahkan hilangnya data Ketika koneksi terputus. Pembaruan sistem Core Tax yang muncul tanpa petunjuk Teknik membuat pegawai kebingungan dan meningkatkan risiko kesalahan pelaporan. bahwa fase implementasi sistem pajak digital sering menghadapi kendala Teknik dan minim sosialisasi.

Upaya pemecahan masalah atau saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan bagian keuangan. Terdapat Beberapa Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan SIPD :

Pertama, untuk mengatasi kesulitan pribadi dalam beradaptasi dengan SIPD perlu dilakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan pemahaman terhadap SIPD agar nantinya dapat mengoperasikan SIPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Modul panduan ringkas juga dapat disiapkan agar pegawai mudah mempelajari kembali langkah pengoperasian SIPD. Berkonsultasi dan berkomunikasi dengan kemendagri dengan sering terjadinya eror. Melaporkan eror, meminta pengecekan server, serta meminta dukungan teknis akan membantu mempercepat perbaikan system. Dan juga perlu membuat data manual agar tidak terpaku pada system aja. Dan berkoordinasi dengan admin kemedagri untuk tidak sinkron nya data dan diperbaiki transaksi yang belum terbaca system. Selain itu, penguatan infrastruktur tekonologi juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas teknologi dan infrastruktur digital melalui perawatan rutin perangkat komputer dan memastikan jaringan internet, Listrik stabil. Sekretariat dapat menyiapkan jaringan cadangan ketika terjadi gangguan serta mengatur penggunaan sistem secara bergantian bila beban akses tinggi. Langkah ini mencegah keterlambatan kerja akibat masalah teknis.

Sedangkan, untuk Core Tax Terdapat beberapa Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan CTAS : Membuat panduan kerja sederhana berisi langkah-langkah penggunaan fitur utama Coretax dan menata ulang alur input agar lebih efisien. Pendekatan ini membantu mengurangi kebingungan pada menu yang kompleks dan meminimalkan kesalahan akibat input ganda. Koordinasi dengan BPKAD atau DJP juga diperlukan untuk memperbaiki transaksi yang belum terhubung otomatis. Kerumitan teknis dan integrasi Coretax dapat diperbaiki dengan menyederhanakan alur input agar langkah pengisian data tidak berulang dan lebih mudah

dipahami. Sistem juga perlu ditingkatkan integrasinya sehingga transaksi dapat terbaca otomatis tanpa input ganda. Gangguan teknis yang sering muncul dapat diminimalkan dengan proses penginputan lebih awal, langkah ini membantu staf menghindari jam padat ketika banyak instansi yang mengakses secara bersamaan. Dan juga dapat mengusulkan kepada BPKAD atau DJP agar meningkatkan kapasitas server atau menyediakan solusi teknis tambahan.

Selain itu, penguatan infrastruktur tekonologi juga perlu dilakukan. Perbaikan dapat dilakukan degan meningkatkan kualitas jaringan listrik maupun internet dan memperbarui perangkat komputer agar gangguan listrik tidak memutus koneksi ketika aplikasi sedang digunakan. Kendala berupa Kurangnya pelatihan dan sosialisasi dapat diselesaikan dengan sekretariat DPRD menyelenggarakan Program pelatihan intensif dan dukungan teknis perlu diberikan untuk meningkatkan literasi teknologi. Pelatihan ini membantu pegawai memahami sistem baru. Modul panduan ringkas juga dapat disiapkan agar pegawai mudah mempelajari kembali langkah pengoperasian Coretax. Mengajukan pendampingan resmi dari BPKAD atau DJP serta melakukan rapat internal berkala untuk menyamakan pemahaman pegawai. Terakhir, perbaikan system dan integrasi antar aplikasi dapat dilakukan dengan Melakukan evaluasi internal setiap kali ada update pada sistem. Pegawai dapat mencatat perubahan menu, format baru, dan alur pelaporan yang berubah. Hasil evaluasi kemudian disampaikan kepada instansi terkait sebagai umpan balik.

Penelitian ini terbatas pada penggunaan sampel yang relative sedikit dan hanya melibatkan satu instansi, yakni Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini belum dapat dijadikan dasar generalisasi secara lebih luas. Data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara dengan keterbatsan para informan, sehingga beberapa temuan mungkin belum mewakili keseluruhan perspektif pengguna system.Penelitian ini dilaksanakan salam kurun waktu yang relative singkat, sehingga peneliti belum dapat mengamati dinamika secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas sistem atau tingkat kepuasan pengguna secara numerik, sehingga analisis yang diperoleh lebih bersifat deskriptif. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya, dengan saran untuk menggunakan sampel yang lebih luas dengan pendekatan mix method, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

KESIMPULAN

Penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan Core Tax Administration System (CTAS) di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan merupakan upaya strategis dalam mendukung transparansi dan modernisasi pengelolaan keuangan serta administrasi perpajakan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Pada SIPD, kendala utama meliputi kurangnya pelatihan berkelanjutan, gangguan server, keterlambatan sinkronisasi data, perangkat teknologi yang belum memadai, serta koordinasi internal antarstaf. Sementara pada Core Tax Administration System kendala yang muncul meliputi kerumitan teknis, kesiapan SDM yang rendah, keterbatasan infrastruktur jaringan, Minimnya sosialisasi, serta pembaruan sistem tanpa petunjuk teknis yang jelas. Meskipun terdapat sejumlah kendala atau hambatan, kedua sistem tetap memberikan dampak posifi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keberhasilan penerapan SIPD dan Coretax sangat bergantung

pada peningkatan kemampuan SDM, perbaikan infrastruktur, pendampingan teknis dari instansi terkait, serta penyusunan SOP yang seragam dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai.

Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan SIPD dan Coretax, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan perlu memperkuat kompetensi pegawai melalui pelatihan rutin, workshop, dan pendampingan berkelanjutan agar staf mampu mengikuti perkembangan fitur dan pembaruan sistem. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi seperti perangkat komputer yang kurang optimal, jaringan Listrik atau koneksi internet yang stabil sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses penginputan dan pelaporan. Sekretariat DPRD juga perlu menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan Kemendagri, BPKAD dan DJP guna mendapatkan pendampingan teknis, terutama saat terjadi gangguan atau perubahan besar pada sistem. Penyusunan SOP yang jelas harus dilakukan dan diterapkan secara konsisten agar tidak terjadi perbedaan prosedur antarbagian. Evaluasi berkala terhadap penggunaan SIPD dan Coretax penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi kendala yang muncul serta menetapkan langkah perbaikan yang tepat. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi internal melalui rapat rutin diperlukan untuk menyamakan pemahaman dan memastikan seluruh staf mengikuti standar kerja yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf program dan keuangan yang telah bersedia memberikan informasi serta meluangkan waktu untuk wawancara dan observasi. Pembimbing dan Dosen: Terima kasih kepada dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan berharga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, N. P., Amelia, P. D., Sakinah, G., Negeri, I., Gunung, S., Bandung, D., & Bandung, K. (2025). *Issn : 3025-9495 123*. *19*(3). https://doi.org/10.2324/yyqfsd88

Arum, M., & Fitrianingsih, D. (2025). *Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia*. *4*(4), 1013–1019. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400

Budi, E. S., Rekayasa, T., Pemerintahan, I., Skripsi, P., & Kawuryan, M. W. (n.d.). *Evaluasi Penerapan Kualitas Aplikasi*. 1–13. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15121

Claresta, S. G., Farina, I., Anggraeni, A., Ghazali, H. D., Khoiriawati, N., Pajak, K., Digital, L., Pajak, S. A., Compliance, T., & Literacy, D. (2025). *1 , 2 , 3 , 4*. *01*(02), 478–492. https://journaledutech.com/index.php/great/issue/view/5

Dampaknya, D. A. N., & Efisiensi, T. (2025). *Implementasi sistem informasi pajak daerah (sipd) dan dampaknya terhadap efisiensi administrasi*. *06*(02), 267–276. https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1347

Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2024). *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*. *3*(1), 10–25. https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8557

Kamilah, A., Lubis, N., Sembiring, Y., Yull, F., Martha, D., & Ilham, R. (2025). *Analisis*

Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara , Kota Padangsidimpuan , Provinsi Sumatera Utara transparan , akuntabel , efisien , dan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih Salah. *6*(1), 43–72. https://doi.org/10.33753/ijse.v6i1.212

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. *3*(2), 114–118. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181

Ruang, T., & Pertanahan, D. A. N. (2024). *Nusantara Hasana Journal*. *4*(5), 58–71. https://doi.org/10.59003/nhj.v4i5.1249

Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). *DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT*. *7*, 193–208. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3

Sijabat, J., Judika, M., Siringoringo, B., Findy, G., & Simanjuntak, R. (2024). *Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota*. *9*(1), 1169–1183. https://doi.org/10.37531/mirai.v11i1

Sipd, D., Laporan, R., Gita, K., Cahyanti, S., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2024). *Penerapan , Hambatan , dan Solusi Sistem Informasi Pemerintah SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng*. *14*(2), 347–358. https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.80176

Uli Lasdao Mara, A. M. (2025). *No Title*. *8*(3), 13202–13215. https://doi.org/10.31538/iijse.v8i3.8386